

Katalog: 7102040.76

RINGKASAN EKSEKUTIF **Perkembangan Nilai Tukar Petani**

SULAWESI BARAT
SEMESTER 1 2016



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT



RINGKASAN EKSEKUTIF
Perkembangan Nilai Tukar Petani

<https://sulbar.bps.go.id>

SULAWESI BARAT
SEMESTER 1 2016



Ringkasan Eksekutif Perkembangan Nilai Tukar Petani Sulawesi Barat Semester I 2016

ISBN: 978-602-0845-60-9
Nomor Publikasi: 76540.1609
Katalog BPS: 7102040.76
Ukuran Buku: 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman: vi + 18 halaman

Naskah:
Bidang Statistik Distribusi

Gambar Kulit:
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh:
© BPS Provinsi Sulawesi Barat

Dicetak Oleh:
CV. Primadigi

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**




KATA PENGANTAR

Ringkasan Eksekutif “Perkembangan Nilai Tukar Petani Sulawesi Barat Semester I 2016” ini merupakan publikasi ringkas yang berisikan perkembangan NTP secara umum, perkembangan NTP menurut subsektor, serta perkembangan indeks harga perdesaan Sulawesi Barat yang menggambarkan tingkat inflasi/deflasi perdesaan.

Publikasi ini berisi data yang *up to date*, sesuai dengan kondisi saat ini. Selain itu, dalam publikasi ini ditambahkan beberapa konsep dan definisi yang mempermudah pengguna data dalam membaca dan memahami isian di dalamnya.

Diharapkan dengan adanya publikasi ini dapat menjadi bahan referensi bagi para pengguna data. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini dan semoga bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna perbaikan dan penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Mamuju, Agustus 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Barat



Suntono, SE, M.Si

VISI DAN MISI
Badan Pusat Statistik

Visi

Pelopor data statistik terpercaya untuk semua

Misi

- a. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;**
- b. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, di dukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia;**
- c. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik**
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua.**
- e. Meningkatkan koordinasi, integritas, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Arti dan Kegunaan NTP	2
1.3. Konsep dan Definisi	4
BAB II. PEMBAHASAN	
2.1. Perkembangan Nilai Tukar Petani Sulawesi Barat Semester I Tahun 2016	9
2.2. Perkembangan Nilai Tukar Petani Sulawesi Barat Menurut Subsektor, Januari – Juni 2016	10
2.2.1. Subsektor Tanaman Pangan (NTP-P)	11
2.2.2. Subsektor Hortikultura (NTP-H)	11
2.2.3. Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-R)	12
2.2.4. Subsektor Peternakan (NTP-T)	12
2.2.5. Subsektor Perikanan (NTPN)	13
2.3. Perkembangan Inflasi Perdesaan	13
2.4. Perbandingan Antar Provinsi Se-Sulawesi	15
LAMPIRAN	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tingkat kesejahteraan masyarakat khususnya daerah pedesaan sangat ditentukan oleh tingkat keberhasilan pembangunan sektor pertanian, karena sektor ini masih sangat mendominasi daerah pedesaan. Sektor pertanian disini adalah dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan salah satunya dengan cara bertani. Sungguh sangat disayangkan jika sektor pertanian tidak dapat dikelola dengan baik karena akan berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan petani. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan dan masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, maka sangat diharapkan sektor pertanian ini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan yang mampu meningkatkan pendapatan para petani dan mampu mengentaskan kemiskinan.

Keberhasilan pembangunan tersebut selain dapat dilihat menggunakan data tentang pertumbuhan ekonomi, diperlukan juga data tentang ukuran tingkat kesejahteraan penduduk khususnya petani. Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan petani.

Yang dimaksud dengan Nilai Tukar Petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dalam persentase. It merupakan suatu indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan, sedangkan Ib dari sisi kebutuhan petani baik

untuk konsumsi maupun produksi. Bila I_t atau I_b lebih besar dari 100, berarti I_t atau I_b lebih tinggi dibandingkan I_t atau I_b pada tahun dasar.

Secara konseptual NTP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian.

Badan Pusat Statistik dalam menyusun NTP telah beberapa kali menggunakan tahun dasar yang berbeda. NTP yang pertama yaitu menggunakan tahun dasar tahun 1976 ($1976=100$), kemudian tahun 1983 ($1983=100$), tahun 1993 ($1993=100$), dan tahun 2007 ($2007=100$). Seiring dengan terjadinya banyak perubahan baik dalam pergeseran nilai produksi komoditas pertanian maupun pola konsumsi (besaran nilai dan jenis variasi komoditas) penduduk pedesaan, maka tahun dasar NTP $2007=100$ diubah ke tahun dasar 2012 ($2012=100$) mulai Bulan Desember 2013.

1.2 Arti dan Kegunaan NTP

Secara umum ada tiga macam pengertian NTP yaitu:

1. $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya; dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.
2. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas/break even. Kenaikan/penurunan harga produksi sama dengan persentase

kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan.

3. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsi. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya.

Sebagai bahan/indikator pengukur tingkat keberhasilan pembangunan NTP memiliki banyak kegunaan dan manfaat, antara lain adalah:

1. Dari indeks harga yang diterima petani (It) dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
2. Dari kelompok konsumsi rumahtangga dalam indeks harga yang dibayar petani (Ib), dapat digunakan untuk melihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan.
3. Nilai tukar petani mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam memproduksi. Hal ini terlihat bila dibandingkan dengan kemampuan tukarnya pada tahun dasar. Dengan demikian, NTP dapat dipakai sebagai salah satu indikator dalam menilai tingkat kesejahteraan petani.

1.3 Konsep dan Definisi

Beberapa konsep dan definisi yang digunakan dalam penghitungan NTP antara lain:

1. **Nilai tukar petani** adalah angka perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.
2. **Indeks harga yang diterima petani** adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen hasil produksi petani.
3. **Indeks harga yang dibayar petani** adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumahtangga petani, baik itu kebutuhan untuk konsumsi rumahtangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian.
4. **Petani** yang dimaksud disini adalah Seseorang atau sekelompok orang yang mengusahakan komoditas pertanian atas resiko sendiri ataupun bagi hasil dengan tujuan untuk dijual baik sebagian atau seluruhnya pada pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, perikanan (tangkap dan budidaya) dan kehutanan. Dalam hal ini termasuk ke dalam kategori petani adalah petani penyewa lahan, dan penggarap (bebas sewa maupun bagi hasil). Orang yang bekerja di sawah/ladang orang lain dengan mengharapkan upah (buruh tani) bukan termasuk petani.

5. **Harga yang diterima petani** adalah rata-rata harga dari suatu jenis komoditas (produksi) dari petani produsen sebelum memasukkan biaya untuk transportasi atau pengangkutan dan pengepakan ke dalam harga penjualannya atau disebut *Farm Gate* (harga di sawah, ladang, kebun setelah pemetikan). Pengertian harga rata-rata adalah harga yang bila dikalikan dengan volume penjualan petani akan mencerminkan total uang yang diterima petani tersebut. Data harga tersebut dikumpulkan dari hasil wawancara langsung dengan petani produsen.
6. **Harga yang dibayar petani** adalah rata-rata harga eceran barang/jasa yang dikonsumsi atau dibeli petani, baik untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya sendiri maupun untuk keperluan biaya produksi pertanian. Data harga barang untuk keperluan produksi pertanian dikumpulkan dari hasil wawancara langsung dengan petani, sedangkan harga barang/jasa untuk keperluan konsumsi rumahtangga dicatat dari hasil wawancara langsung dengan pedagang atau penjual jasa di pasar terpilih.
7. **Pasar** adalah tempat terjadinya transaksi antara penjual dengan pembeli atau tempat yang biasanya terdapat penawaran dan permintaan. Pada kecamatan yang sudah terpilih sebagai sampel, pasar yang dicatat haruslah pasar yang cukup mewakili dengan syarat antara lain: paling besar, banyak pembeli dan penjual, jenis barang yang diperjualbelikan cukup banyak dan terjamin kelangsungan pencatatan harganya, serta terletak di desa perdesaan (rural).

8. **Harga eceran perdesaan** adalah harga transaksi antara penjual dan pembeli secara eceran di pasar setempat untuk tiap jenis barang yang dibeli dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual kepada pihak lain. Harga yang dicatat adalah harga modus (yang terbanyak muncul) atau harga rata-rata biasa dari beberapa pedagang/penjual yang memberikan datanya.
9. Formula atau rumus yang digunakan pada penghitungan I_t dan I_b adalah formula Indeks Laspeyres yang dikembangkan (*Modified Laspeyres Indexes*), yaitu:

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^m P_{oi} Q_{oi}} \times 100$$

Keterangan:

- I_n : Indeks harga bulan ke-n (I_t maupun I_b)
- P_{ni} : Harga bulan ke-n untuk jenis barang ke-i
- $P_{(n-1)i}$: Harga bulan ke-(n-1) untuk jenis barang ke-i
- $P_{ni}/P_{(n-1)i}$: Relatif harga bulan ke-n untuk jenis barang ke-i
- P_{oi} : Harga pada tahun dasar untuk jenis barang ke-i
- Q_{oi} : Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke-i
- m : Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas.

10. Formula untuk penghitungan Nilai Tukar Petani (NTP):

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

Keterangan:

NTP : Nilai Tukar Petani

I_t : Indeks harga yang diterima petani

I_b : Indeks harga yang dibayar petani

BAB II

PEMBAHASAN

2.1. Perkembangan Nilai Tukar Petani Sulawesi Barat

Pergerakan nilai tukar petani (NTP) Sulawesi Barat memperlihatkan *trend* yang menggembirakan selama periode semester I tahun 2016. Hal ini disebabkan karena pergerakan NTP selama semester I tahun 2016 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada awal semester I tahun 2016, NTP Sulawesi Barat dibuka pada titik 106,05. NTP Sulawesi Barat mengalami sedikit penurunan pada bulan Februari menjadi 106,04 dan berada pada titik terendah selama periode semester I 2016. Pada bulan Maret 2016, NTP Sulawesi Barat mengalami peningkatan menjadi sebesar 106,11 kemudian meningkat pada bulan April menjadi sebesar 106,65. NTP Sulawesi Barat pada bulan Mei mengalami penurunan menjadi sebesar 106,61. Penurunan yang terjadi pada Bulan Mei disebabkan oleh peningkatan indeks yang diterima petani dibandingkan bulan sebelumnya lebih rendah jika dibandingkan peningkatan indeks yang dibayar petani. Kondisi ini mengakibatkan NTP pada Bulan Mei mengalami penurunan. NTP Sulawesi Barat mencapai puncaknya selama semester I pada bulan Juni dengan NTP sebesar 107,51.

Dalam kurun waktu semester I tahun 2016, nilai NTP tertinggi Sulawesi Barat terjadi di bulan Juni yang mencapai 107,51 dengan indeks yang diterima petani (It) mencapai 127,10 lebih tinggi dibanding indeks yang dibayar petani (Ib) yang hanya berkisar 118,22. NTP Sulawesi Barat yang terendah

terjadi di bulan Februari yang berkisar 106,04 dengan It dan Ib masing-masing 125,07 dan 117,95.

Jika diukur dari NTP, kesejahteraan petani Sulawesi Barat secara umum yang cenderung mengalami peningkatan, diharapkan dapat meningkat secara signifikan. Peningkatan tersebut tentunya harus didukung dengan kebijakan dari pemerintah yang benar-benar riil agar petani Sulawesi Barat pada khususnya dapat lebih sejahtera. Misalnya dengan membuka regulasi pemberian bantuan dan penyuluhan kepada petani.

Grafik 1 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Sulawesi Barat, Semester I Tahun 2016



2.2. Perkembangan Nilai Tukar Petani Sulawesi Barat Menurut Subsektor, Januari – Juni 2016.

NTP dibentuk oleh 5 (lima) subsektor. Kelima subsektor tersebut adalah subsektor tanaman pangan, subsektor hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan.

Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa komponen pembentuk NTP masih cukup bervariasi, dan semua NTP subsektor di atas angka 100 jika dilihat secara rata-rata pada semester I tahun 2016. Namun, jika dirinci per bulan, pada bulan Juni 2016, NTP subsektor tanaman pangan berada di bawah angka 100. Turunnya nilai tukar petani subsektor tanaman pangan ini disebabkan indeks harga yang diterima turun sedangkan indeks harga yang dibayar meningkat.

2.2.1. Subsektor Tanaman Pangan (NTPP)

Kondisi petani subsektor tanaman pangan, yang terdiri dari subkelompok padi dan subkelompok palawija, perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Hal ini fluktuasi pergerakan NTPP yang cenderung mengalami penurunan. NTPP pada bulan Januari 2016 dibuka dengan angka 104,09 dan ditutup pada bulan Juni 2016 sebesar 99,12. Secara rata-rata, NTPP semester 1 tahun 2016 sebesar 103,08. Jika tidak segera diberikan perhatian serius oleh pemerintah daerah, dikhawatirkan kesejahteraan petani subsektor NTPP akan semakin turun yang dapat dilihat dari terus menurunnya NTPP.

2.2.2. Subsektor Hortikultura (NTPH)

NTP subsektor hortikultura didukung oleh subkelompok buah-buahan, sub kelompok sayur-sayuran, dan subkelompok tanaman obat-obatan

memperlihatkan pola yang berbeda dengan sub sektor tanaman pangan. NTPH selama semester I tahun 2016 cenderung di atas 100, meskipun berfluktuasi, namun masih tetap di atas angka 100. Secara umum, pergerakan NTPH menunjukkan peningkatan. Selama semester I tahun 2016 NTPH tertinggi terjadi pada bulan April 2016 yang mencapai 105,66 sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Januari 2016 dengan NTPH sebesar 101,56.

2.2.3. Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)

Subsektor tanaman perkebunan rakyat memiliki nilai NTP yang lebih tinggi dibanding dengan NTP subsektor lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa peningkatan kesejahteraan petani subsektor ini lebih tinggi dibandingkan subsektor lain dengan perbandingan tahun dasar yang sama, yaitu tahun 2012. Selama periode semester I tahun 2016 NTP subsektor tanaman perkebunan rakyat berfluktuatif dan selalu berada di atas NTP Sulawesi Barat.

NTPR tertinggi terjadi di bulan Juni yang mencapai 116,66 dengan nilai It dan Ib masing-masing sebesar 139,50 dan 119,58. NTPR terendah terjadi di bulan Maret yang hanya sebesar 109,62 dengan nilai It dan Ib masing-masing sebesar 130,82 dan 119,34. NTPR semester I tahun 2016 sebesar 112,71 atau turun sebesar 1,32 persen jika dibandingkan dengan semester II tahun 2015.

2.2.4. Subsektor Peternakan (NTP-T)

Pergerakan NTP subsektor peternakan cukup fluktuatif dan mencapai puncaknya pada bulan Juni 2016. NTP pada semester I tahun 2016 mencapai 102,93 atau turun 0,41 persen jika dibandingkan semester sebelumnya. It dan Ib semester II ini masing-masing sebesar 119,16 dan 115,77. NTP tertinggi

terjadi pada bulan Juni yang mencapai 104,34 dengan It dan Ib masing-masing sebesar 120,96 dan 115,93. Pada akhir semester I tahun 2016, NTPPT sebesar 104,34 atau meningkat sekitar 1,24 persen dibandingkan bulan Mei 2016.

2.2.5. Subsektor Perikanan (NTPN)

Selama semester I tahun 2016, NTPN berfluktuatif dan cenderung di atas 100. NTPN tertinggi terjadi pada bulan Juni 2016 sebesar 102,43 sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Februari sebesar 100,24. NTPN periode semester I tahun 2016 adalah 101,12.

2.3. Perkembangan Inflasi Pedesaan

Inflasi pedesaan merupakan perubahan indeks konsumsi rumah tangga masyarakat pedesaan dalam kurun waktu tertentu biasanya dengan *range* waktu satu bulan. Kelompok pembentuk inflasi pedesaan terdiri dari kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi; kelompok perumahan; kelompok sandang; kelompok kesehatan; kelompok pendidikan rekreasi dan olah raga dan kelompok transport dan komunikasi.

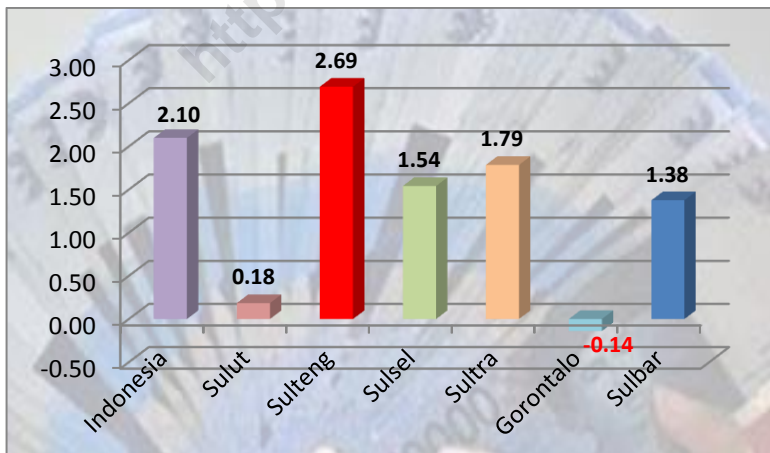
Pada semester I tahun 2016, inflasi pedesaan Sulawesi Barat sebesar 1,38 persen. Pendongkrak utama terjadinya inflasi berada pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 3,01 persen, kemudian diikuti oleh kelompok kesehatan sebesar 2,54 persen. Kelompok yang mengalami inflasi paling kecil adalah pendidikan, rekreasi, dan olahraga dengan inflasi sebesar 0,26 persen, sedangkan kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi mengalami deflasi sebesar 3,01 persen..

Selama semester berjalan, deflasi pedesaan hanya terjadi pada bulan April, yaitu sebesar 0,39 persen. Deflasi ini dipicu oleh turunnya indeks harga

kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 1,71 persen dan indeks harga bahan makanan sebesar 0,81 persen. Sementara itu, lima kelompok pengeluaran lainnya mengalami inflasi.

Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Januari 2016, sebagai pembuka semester I tahun 2016, sebesar 0,73 persen. Tingginya inflasi pada bulan Januari ini dipicu oleh naiknya indeks harga kelompok bahan makanan sebesar 1,33 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,89 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 0,75 persen, kelompok perumahan sebesar 0,74 persen, kelompok sandang sebesar 0,72 persen, dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 0,20 persen. Sementara itu kelompok transportasi dan komunikasi mengalami deflasi sebesar 1,48 persen.

Grafik 2 Perbandingan Inflasi Perdesaan Provinsi Se-Sulawesi (Persen), Semester I Tahun 2016



2.4 Perbandingan Antar Provinsi Se Sulawesi

Pada semester I tahun 2016, dari enam provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, tiga provinsi di antaranya memiliki NTP di atas 100, yaitu Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Empat provinsi mengalami perubahan positif dibandingkan semester II 2015, sedangkan sisanya, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, mengalami perubahan negatif. Provinsi yang mengalami perubahan positif adalah Gorontalo yang mengalami peningkatan sebesar 1,73 persen, diikuti Sulawesi Utara yang meningkat sebesar 1,06 persen, Sulawesi Tengah meningkat 0,89 persen, dan Sulawesi Barat sebesar 0,76 persen.

LAMPIRAN

**Tabel 1 Perkembangan NTP Menurut Sub sektor,
Januari – Juni 2016**

Sub sektor	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Smt I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Tanaman Pangan							
a. Indeks yang Diterima (It)	123,68	125,83	125,37	120,27	118,25	117,63	121,84
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	117,90	118,22	118,29	117,95	118,13	118,68	118,19
c. Nilai Tukar Petani (NTP-P)	104,90	106,44	105,99	101,97	100,10	99,12	103,08
2. Hortikultura							
a. Indeks yang Diterima (It)	119,00	120,65	123,75	123,69	123,82	124,38	122,55
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	117,17	117,48	117,52	117,06	117,31	117,86	117,40
c. Nilai Tukar Petani (NTP-H)	101,56	102,70	105,30	105,66	105,54	105,53	104,39
3. Tan. Perkebunan Rakyat							
a. Indeks yang Diterima (It)	133,49	131,69	130,82	134,37	136,08	139,50	134,33
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	119,09	119,25	119,34	118,81	119,02	119,58	119,18
c. Nilai Tukar Petani (NTP-R)	112,10	110,44	109,62	113,10	114,34	116,66	112,71
4. Peternakan							
a. Indeks yang Diterima (It)	118,40	118,55	118,73	119,19	119,14	120,96	119,16
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	115,68	115,97	115,91	115,55	115,61	115,93	115,77
c. Nilai Tukar Petani (NTP-T)	102,35	102,22	102,43	103,15	103,06	104,34	102,93
5. Perikanan							
a. Indeks yang Diterima (It)	118,10	119,35	118,08	118,36	118,71	120,73	118,89
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	117,80	117,88	117,79	116,85	117,24	117,87	117,57
c. Nilai Tukar Petani (NTN)	100,25	101,24	100,24	101,30	101,25	102,43	101,12
Gabungan :							
a. Indeks yang Diterima (It)	124,82	125,07	125,19	125,35	125,50	127,10	125,50
b. Indeks yang Dibayar (Ib)	117,70	117,95	117,98	117,53	117,71	118,22	117,85
c. Nilai Tukar Petani (NTP)	106,05	106,04	106,11	106,65	106,61	107,51	106,50

Tabel 2 Perkembangan Inflasi Perdesaan Menurut Kelompok, Januari – Juni 2016

Kelompok	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Smt I
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bahan Makanan	1,33	0,24	-0,03	-0,81	0,24	0,76	1,73
Makanan Jadi	0,75	0,35	0,20	0,56	0,35	0,75	3,01
Perumahan	0,74	0,12	0,05	0,08	0,30	0,13	1,43
Sandang	0,72	-0,01	0,12	0,25	0,07	0,48	1,65
Kesehatan	0,89	0,58	0,04	0,51	0,42	0,07	2,54
Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	0,20	0,06	-0,22	0,29	0,32	-0,10	0,56
Transportasi & Komunikasi	-1,48	-0,13	0,19	-1,71	-0,31	0,42	-3,00
Inflasi Perdesaan	0,73	0,20	0,05	-0,39	0,21	0,57	1,38

Tabel 3 Nilai Tukar Petani Provinsi dan Persentase Perubahannya Semester I Tahun 2016 (2012=100)

PROVINSI	IT		IB		NTP	
	INDEKS	% PERB	INDEKS	% PERB	RASIO	% PERB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Utara	119,59	2,55	123,13	1,47	97,13	1,06
Sulawesi Tengah	121,19	3,25	121,63	2,33	99,64	0,89
Sulawesi Selatan	129,25	1,26	123,10	1,89	105,00	-0,63
Sulawesi Tenggara	120,85	1,03	121,24	1,85	99,68	-0,81
Gorontalo	130,21	3,29	123,83	1,52	105,15	1,73
Sulawesi Barat	125,50	2,29	117,85	1,51	106,50	0,76

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://sulbar.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT**
Jl. RE.Martadinata No 10 Mamuju
Tlp. (0426) 21265 Fax. (0426) 22103
Email: sulbar@bps.go.id
Homepage: <http://sulbar.bps.go.id>

ISBN 978-602-08-4560-9



9 786020 845609